

## ABSTRAK

Judul : “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Umum, Dalam Perspektif UUK-PKPU”  
Nama : Ratna Nurul Afiah  
NRP : 1210922013  
Kata Kunci : Kejaksaan, Kepailitan, kepentingan umum

Menurut Undang-undang Kejaksaan, institusi Kejaksaan mempunyai tugas, wewenang dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha Negara, diantaranya Kejaksaan dapat mengajukan kepailitan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana fungsi Kejaksaan sebagai pemohon pailit untuk kepentingan umum, dan kendala apa yang ditemui dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Dengan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum, apabila memenuhi syarat-syarat, yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta juga memenuhi syarat kepentingan umum, antara lain 1) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 2) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 3) debitor tidak bertitikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Fungsi kejaksaan sebagai pemohon pailit untuk kepentingan umum ini sebagai instrumen yang dapat memudahkan Kejaksaan melakukan percepatan eksekusi perkara pidana yang putusannya terhadap barang bukti, mengandung “membagi secara adil dan seimbang kepada para investor yang jumlahnya banyak”. Untuk tercapainya penegakan hukum yang berintikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka substansi UUK-PKPU perlu disempurnakan yakni adanya peraturan mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan setelah permohonan pailitnya dikabulkan oleh pengadilan, karena status barang bukti dalam perkara pidana yang diajukan permohonan pailit dimaksud secara otomatis berubah menjadi harta pailit. bagaimana peralihan harta pailit dari kejaksaan kepada kurator sebagai petugas yang harus mengurus dan membereskan harta pailit tersebut. Peraturan putusan serta-merta dalam kepailitan juga perlu ditinjau kembali, karena dapat merugikan institusi Kejaksaan, manakala dalam upaya kasasi yang diajukan oleh termohon pailit dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

## ABSTRACTION

Title : "Function of Attorney's Office As Bankrupt Applicant For the sake of Public, In Perspective of UUK-PKPU"  
Name : Ratna Nurul Afiah  
NRP : 1210922013  
Keyword : attorney's office, bankruptcy, public of interest.

According to Code Prosecutor, Attorney's Office institution has duty, authority and function in civil area and arranges State business, between of Attorney's Office can filled for bankruptcy the sake of public as arranged in UUK-PKPU. Problem of this thesis is how function of Attorney's Office as bankrupt applicant for the sake of public, and constraint of what encountered and effort which is done to overcome the constraint. With research of juridis normatif note that Attorney's Office can apply for bankrupt for the sake of public, if fulfilling conditions, namely debtor which has two or more creditor and do not pay totally, at least one debt which have yield to maturity and collectable, and also up to standard of public interest, for example 1) debtor embezzling is part of properties possession; 2) debtor has the debt which comes from accumulation of fund from public of wide; 3) debtor do not have faith either or not co-operative in solve the problem of receivable and liability which have yield to maturity. Attorney's office function as bankrupt applicant for the sake of public as an instrument that can fasilitate the acceleration attorney of criminal execution which its decision to proof goods, contain "to divide well-balanced and fairly to investors which the many numbers". To be reached him(her straightening of law cored certainty, justice and efficacy of law, then substance UUK-PKPU need to be enhanced namely existence of regulation about duty and attorney's office authority of after application of its(the bankrupt granted by court, because of proof goods status in criminal which is submitted application of bankrupt intended automatically turns into bankrupt possession. how switchover of bankrupt possession from attorney's office to curator as officer which must take care and sets right the bankrupt possession. Regulation of decision instantaneously in bankruptcy also needs term returns, because can be detrimental Attorney's Office institution, when in effort of cassation which is submitted from the applicant bankrupt granted by supreme court.